

## SIARAN PERS Untuk Disiarkan Segera

### **Kerjasama Penguatan Pelindungan dan Pemberdayaan Awak Kapal Perikanan Migran, Nelayan Kecil dan Nelayan Buruh di Jawa Tengah**

**Semarang, Jawa Tengah, 22 Mei 2022** - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) pada hari Senin (22/5). Penandatanganan MoU bertajuk “Penguatan Pelindungan dan Pemberdayaan Awak Kapal Perikanan Migran dan Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan Kecil)” tersebut terselenggara setelah upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-115 yang tahun ini bertemakan “Semangat untuk Bangkit”.

Nota Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan semangat kebangkitan nasional. Dalam upacara ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa “Hari Kebangkitan Nasional dimaknai dengan memperingati perjuangan bersama. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh elemen bangsa saling bahu-membahu berkolaborasi menerapkan nilai-nilai persatuan juga kesatuan dalam mewujudkan kebangkitan bangsa kita.”

Kesepakatan Bersama antara Pemprov Jateng dan IOJI diharapkan dapat menyinergikan kerja sama antar berbagai pihak guna memperkuat pelindungan dan pemberdayaan awak kapal perikanan (AKP) migran, nelayan kecil, nelayan buruh, nelayan perempuan, dan masyarakat termarginalisasi lainnya yang menggantungkan hidup dan penghidupannya dari laut di Jawa Tengah. Melalui kerjasama ini, diharapkan pula akan terjalin kerja sama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, penelitian, pengembangan instrumen hukum dan kebijakan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kesepakatan kerjasama berangkat dari fakta banyaknya jumlah AKP migran, nelayan buruh, dan nelayan kecil di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2021, 1.408 AKP Migran ditempatkan oleh perusahaan pemegang Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal di Provinsi Jawa Tengah (BP3MI Jawa Tengah, 2022). Data ini tidak merepresentasikan jumlahnya AKP migran asal Jawa Tengah dikarenakan banyak AKP migran berangkat secara non-prosedural. AKP migran, termasuk yang berangkat dari Jawa Tengah, rentan terhadap pelanggaran HAM dan hak-hak perburuhan di seluruh tahapan migrasi mereka, termasuk penipuan dan pemalsuan dokumen, jeratan hutang,

dan penahanan gaji. Bekerja di atas kapal ikan di luar negeri juga kerap menempatkan AKP migran terisolasi di tengah laut, dan sulit mendapatkan akses terhadap bantuan dan komunikasi. Tantangan lain bagi perlindungan AKP asal Jawa Tengah adalah maraknya keberadaan calo, masifnya informasi lowongan pekerjaan dan penempatan non-prosedural, serta minimnya kompetensi pekerja, pengetahuan mengenai hak-hak AKP, serta budaya kerja di negara tujuan maupun bendera kapal.

“Provinsi Jawa Tengah juga merupakan provinsi dengan jumlah nelayan yang sangat besar di Indonesia. Nelayan kecil dan nelayan buruh di Jawa Tengah juga menghadapi berbagai permasalahan, seperti kecelakaan di laut, kesulitan karena dampak eksploitasi maupun perubahan iklim terhadap ekosistem kelautan dan perikanan, dan permasalahannya lainnya yang disebabkan oleh posisi tawar nelayan yang tidak seimbang dengan pemilik modal, pemberi kerja, dan pembuat kebijakan,” kata Mas Achmad Santosa, CEO IOJI.

Pemerintah Daerah Provinsi memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dapat dioptimalkan dalam menghadapi berbagai tantangan perlindungan dan pemberdayaan yang telah disebutkan. Sehubungan dengan perlindungan awak kapal perikanan migran, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi berfokus pada tahapan sebelum dan setelah bekerja (pra dan purna migran). Bentuk-bentuk perlindungan tersebut antara lain diseminasi informasi, penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi, pelatihan dan pendidikan, pengawasan dan pembinaan, serta penyelesaian hak-hak AKP migran.

“Pemerintah Provinsi juga bertanggung jawab atas perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Perlindungan dilakukan antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan, jaminan kepastian usaha, dan jaminan keamanan dan keselamatan. Sedangkan pemberdayaan dilakukan antara lain melalui penyediaan pendidikan dan pelatihan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta kerjasama dan kemitraan usaha,” ujar Fendiawan Tiskiantoro, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam perlindungan dan pemberdayaan AKP migran dan pelaku usaha perikanan tentu membutuhkan anggaran dan sumber daya manusia yang cukup besar. Oleh karenanya, kerjasama yang erat antar instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah serta masyarakat dapat berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut.

“Secara garis besar, IOJI berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam berbagai jenis-jenis kegiatan untuk perlindungan AKP migran dan pelaku

usaha perikanan, dalam bentuk (i) penelitian dan penyusunan kertas kebijakan, (ii) pengembangan instrumen hukum dan kebijakan, (iii) strategi dan peta jalan, (iv) produk komunikasi dan diseminasi informasi, (v) pelaksanaan program-program perlindungan AKP dan nelayan di Jawa Tengah, salah satunya melalui pengawasan, (vi) penguatan sistem, kelembagaan, koordinasi pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan kesadaran mengenai hak-hak dasar, budaya di negara tujuan, dan mekanisme pemenuhan hak, bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, serta (vii) memfasilitasi pertemuan dan diskusi antara pemangku kepentingan,” pungkask CEO IOJI.\*\*\*

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Fadilla Octaviani, mobile phone +62 811-8460-065, email [info@oceanjusticeinitiative.org](mailto:info@oceanjusticeinitiative.org)

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) adalah lembaga think-tank dan advokasi kebijakan yang mendukung Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, untuk mewujudkan tata kelola kelautan dengan berlandaskan prinsip perlindungan yang efektif, pemanfaatan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan yang berkeadilan. IOJI membangun kolaborasi dengan aktor negara dan non negara untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat nasional, regional dan internasional dengan menyediakan berbagai usulan kebijakan berbasis bukti ilmiah. IOJI juga melakukan kerja pendampingan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang hidupnya bergantung pada laut, seperti nelayan kecil, masyarakat pesisir dan pekerja migran pelaut perikanan, dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka.

#### **Catatan untuk Editor**

1. Cakupan dan masa berlaku kesepakatan bersama
  - a. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
    - i. penguatan perlindungan dan pemberdayaan Awak Kapal Perikanan Migran dari Provinsi Jawa Tengah di tahapan sebelum dan setelah bekerja;
    - ii. penguatan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah;
    - iii. bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing.
  - b. Masa berlaku kesepakatan bersama adalah 5 (lima) tahun
2. Definisi Nelayan Kecil dan Nelayan Buruh berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman
  - o Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
  - o Nelayan buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

